

PELATIHAN PERANGKAT DESA UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD VILLAGE GOVERNMENT* BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Nono Heryana¹, Rini Mayasari²

¹Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singaperbangsa Karawang

²Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS Ronggowaluyo Telukjambe Timur, Karawang

nono@unsika.ac.id*, rini.mayasari@staff.unsika.ac.id

(*) Corresponding Author



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Abstract

The Village Officials Training for the Realization of Good Village Governance Based on Information and Communication Technology (ICT) is part of a community service initiative aimed at enhancing the capacity of village officials to deliver efficient, transparent, and accountable public services. The program was implemented in Mekarbuana Village, Tegalwaru District, Karawang Regency, with participants consisting of village officials directly involved in administrative management and public service delivery. The community engagement employed a combination of methods, including structured training, hands-on mentoring, practical sessions on the use of the Village Information System (SID), and an evaluation of participants' competencies through pre-test and post-test assessments. The training materials focused on improving digital literacy, managing administrative data using ICT tools, operating digital-based public service applications, and utilizing the official village website as a medium for transparency and public communication. The results demonstrated a significant improvement in participants' technological competence and understanding. The average comprehension score increased from 58% to 87% after the training. Most participants were able to manage population and administrative data electronically, update public information content on the village website, and respond to citizens' feedback through digital platforms. The program also fostered greater motivation among village officials to optimize ICT-based public services and to apply the principles of Good Village Governance. This activity proves that the integration of ICT into village governance not only improves efficiency and the quality of public services but also promotes community participation and builds a culture of transparency and accountability at the local government level.

Keywords: digitalization; digital literacy; digital village development service; information technology; village government.

Abstrak

Pelatihan Perangkat Desa untuk Mewujudkan *Good Village Governance* Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, dengan sasaran utama perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan kepada warga. Metode pengabdian yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan langsung, praktik penggunaan Sistem Informasi Desa (SID), serta evaluasi kemampuan peserta melalui *pre-test* dan *post-test*. Materi pelatihan difokuskan pada peningkatan literasi digital, pengelolaan data administrasi berbasis TIK, pengoperasian aplikasi pelayanan publik, serta pemanfaatan *website* desa sebagai media transparansi dan komunikasi dengan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kemampuan dan pemahaman peserta dalam penggunaan TIK. Rata-rata nilai pemahaman meningkat dari 58 % menjadi 87 % setelah pelatihan. Sebagian besar peserta telah mampu mengelola data kependudukan dan administrasi secara elektronik, memperbarui konten informasi publik di *website* desa, serta

menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara digital. Selain itu, pelatihan ini berhasil menumbuhkan motivasi perangkat desa untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis teknologi serta memperkuat penerapan prinsip *Good Village Governance*. Kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi TIK dalam tata kelola desa tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat serta membangun budaya transparansi di tingkat pemerintahan desa.

Kata kunci: digitalisasi; literasi digital; pengabdian pengembangan desa digital; teknologi informasi; pemerintahan desa.

PENDAHULUAN

Keterbatasan literasi digital perangkat desa masih menjadi persoalan utama dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa. Banyak desa belum memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) secara optimal akibat kurangnya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, sehingga proses administrasi masih dijalankan secara manual dan berimplikasi pada keterlambatan layanan kepada warga [1], [2], [3], [4], [5]. Beberapa studi menegaskan bahwa inisiatif digitalisasi belum diikuti oleh kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola *website* desa, aplikasi pelayanan publik, dan sistem informasi secara berkelanjutan [6], [7], [8], [9], [10]. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi informasi dan praktik operasional di lapangan, yang menuntut strategi peningkatan kapasitas berbasis pelatihan terstruktur dan pendampingan riset bagi perangkat desa [11], [12].

Transformasi digital di tingkat desa merupakan bagian penting dari kebijakan nasional menuju tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien melalui penerapan *e-government*. Program *Smart Village* dan agenda *Sustainable Development Goals (SDG)* 9 menekankan pentingnya infrastruktur, inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik [8], [13]. Rendahnya literasi digital berpotensi memperlebar kesenjangan layanan antara desa dan kota, sehingga pelatihan dan pendampingan sistematis menjadi langkah strategis untuk mempercepat adopsi *e-government* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik [3]. Dalam konteks ini, literasi digital dan kapasitas SDM desa berperan sebagai fondasi dalam mewujudkan *Good Village Governance* yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa semakin mendesak mengingat sebagian besar belum memahami konsep *e-government* dan masih kesulitan dalam pengelolaan aplikasi pelayanan publik. Pelatihan yang efektif harus memadukan aspek teknis,

manajerial, dan etika pelayanan publik berbasis digital [14]. Peningkatan kompetensi ini terbukti dapat memperbaiki kualitas layanan publik dan memperkuat kepatuhan terhadap prosedur administrasi [8], [13]. Pendekatan pelatihan partisipatif juga terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan praktis perangkat desa [15]. Untuk desa yang belum memiliki sistem digital, pengembangan modul pelatihan berbasis *Knowledge Management System (KMS)* desa digital menjadi langkah penting guna memperluas adopsi inovasi [16].

Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan desa telah menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dua pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik [17], [18]. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memungkinkan pengelolaan data, penyampaian informasi, serta layanan publik dilaksanakan secara lebih efisien dan terbuka [19], [20], [21]. Melalui penggunaan sistem informasi desa, proses administrasi dapat terdokumentasi secara digital sehingga mengurangi potensi kesalahan, meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas publik [22], [23]. Dalam konteks pemerintahan lokal, digitalisasi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, di mana warga dapat ikut mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja aparatur desa secara langsung [24].

Penelitian terkini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan desa pintar (*smart village*) sangat dipengaruhi oleh kesesuaian teknologi dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis wilayah pedesaan [25]. Teknologi yang diadopsi tanpa mempertimbangkan konteks lokal sering kali tidak berkelanjutan dan gagal menjawab kebutuhan masyarakat [26]. Oleh karena itu, pendekatan yang berbasis partisipasi dan adaptasi lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi TIK di desa [27], [28]. Pemahaman terhadap konteks sosial dan kapasitas SDM lokal harus menjadi dasar dalam setiap intervensi teknologi agar tidak hanya berorientasi pada inovasi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan institusional [29], [30].

Selain kesesuaian konteks lokal, dukungan kebijakan dan infrastruktur digital juga memegang peranan strategis dalam mempercepat transformasi digital desa [31]. Ketersediaan jaringan internet, perangkat keras, dan sistem pendukung berbasis data terbukti memperkuat kesiapan teknis perangkat desa dalam mengelola sistem informasi secara mandiri dan berkelanjutan [32]. Dukungan pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan *Smart Village*, Satu Data Indonesia, serta penguatan literasi digital menjadi pendorong penting bagi akselerasi tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi informasi [33]. Dengan adanya kebijakan dan infrastruktur yang memadai, proses digitalisasi tidak hanya mempercepat pelayanan publik, tetapi juga memperkuat daya saing desa di era ekonomi digital [34], [35].

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penelitian sebelumnya mengenai optimalisasi *Good Village Governance* berbasis teknologi informasi di Desa Mekarbuana. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas perangkat desa melalui transfer pengetahuan yang terstruktur dan berbasis riset. Kegiatan pelatihan dilakukan secara komprehensif melalui metode ceramah, praktik langsung, dan studi kasus yang relevan dengan permasalahan faktual di lapangan [36], [37], [38]. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis perangkat desa dalam mengelola Sistem Informasi Desa (SID), tetapi juga mengembangkan pemahaman manajerial dan etika pelayanan publik digital.

Lebih jauh, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk meningkatkan literasi digital perangkat desa, memperkuat tata kelola administrasi berbasis data, dan mengukur dampak peningkatan kompetensi terhadap kualitas layanan publik [33]. Dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat praktik *Good Village Governance* yang berkelanjutan [39]. Kontribusi utama program ini adalah memperkaya literatur akademik dan praktik empiris dalam bidang pengembangan desa digital serta memberikan rekomendasi kebijakan yang sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan agenda nasional *Smart Village* [40]. Melalui penguatan kapasitas SDM dan tata kelola berbasis TIK, desa diharapkan mampu menjadi entitas yang adaptif, mandiri, dan inklusif dalam menghadapi tantangan digitalisasi pemerintahan [41]. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan literasi digital dan kapasitas perangkat desa dalam mengelola Sistem Informasi

Desa (SID) berbasis prinsip *Good Village Governance*.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode pelatihan dan pendampingan langsung kepada perangkat desa di Desa Mekarbuana. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pembuatan situs web resmi desa, pelatihan sumber daya manusia di desa untuk meningkatkan literasi digital mereka, serta menggigitalisasi berbagai informasi desa dan layanan publik pemerintah. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan langkah-langkah penting dalam mewujudkan visi desa yang memiliki kekuatan digital dan mandiri. Adapun untuk Langkah-langkah pelatihan dan pendampingan perangkat desa untuk mewujudkan *Good Village Government* dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2025)

Gambar 1. Langkah Dan Proses Pelaksaan Pelatihan Perangkat Desa

Kegiatan-kegiatan ini sangat penting karena sejalan dengan inisiatif pemerintah saat ini untuk beralih ke era desa yang berbasis digital dan mandiri. Penerapan *E-Government* dalam tata kelola desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan tata kelola yang baik dan penyampaian layanan publik yang lebih efisien dan efektif. Dalam upaya mengoptimalkan pemerintahan desa yang baik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sangat penting untuk mengatasi ketidakefisienan layanan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelayanan Perangkat Desa melalui Optimalisasi *Good Village Government* Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Mekarbuana. Hasil dari penerapan berbagai langkah-langkah tersebut diharapkan mampu membuat perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Peningkatan Kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Kegiatan peningkatan kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilaksanakan melalui serangkaian pelatihan terstruktur yang mencakup aspek teknis dan praktis bagi perangkat desa. Materi pelatihan meliputi pengenalan dasar-dasar literasi digital, pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID), penggunaan aplikasi administrasi berbasis web, serta pengelolaan konten informasi publik di situs resmi desa. Selain itu, peserta dilatih untuk membuat dan memperbarui data kependudukan, laporan keuangan desa, serta pengarsipan dokumen secara digital. Pendampingan juga dilakukan secara langsung oleh tim pengabdian untuk memastikan setiap peserta mampu mengoperasikan perangkat komputer, memahami tata kelola data berbasis sistem, dan memanfaatkan media daring sebagai sarana komunikasi publik.

Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi perangkat desa dalam mengelola data dan layanan publik secara digital, serta tumbuhnya kemandirian dalam penggunaan TIK untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan kemampuan tersebut, perangkat desa diharapkan mampu: mengelola informasi kependudukan dan layanan administrasi secara cepat dan akurat; menyediakan informasi publik melalui website desa secara *real time*; mengoptimalkan komunikasi digital dengan masyarakat dan lembaga eksternal; serta mengimplementasikan prinsip *Good Village Governance* melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi peserta. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang dilakukan terhadap 15 perangkat desa, terjadi peningkatan rata-rata skor pemahaman dari 58% menjadi 87%, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan yang substansial dalam pengoperasian aplikasi berbasis TIK. Selain itu, hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam mengindikasikan bahwa 80% peserta telah mampu melakukan input dan pembaruan data melalui platform SID secara mandiri, sedangkan sisanya masih membutuhkan pendampingan lanjutan untuk penyempurnaan administrasi digital. Para peserta juga menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi serta antusiasme tinggi dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis digital di desanya.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2025)

Gambar 2. Antusiasme Peserta Pelatihan

Gambar 2 menunjukkan antusiasme peserta selama kegiatan pelatihan berlangsung. Peserta terlihat aktif mengikuti setiap sesi, mengajukan pertanyaan, dan mempraktikkan langsung materi yang diajarkan. *Respons* positif tersebut mencerminkan keberhasilan metode pelatihan berbasis praktik yang diterapkan dalam kegiatan ini. Selain peningkatan keterampilan teknis, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan partisipatif.

Peningkatan Pengetahuan Administrasi Desa

Kegiatan peningkatan pengetahuan administrasi desa dilakukan melalui pelatihan dan praktik langsung mengenai tata kelola administrasi pemerintahan berbasis digital. Materi pelatihan difokuskan pada pengenalan sistem administrasi modern yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID) dan aplikasi pendukung lainnya. Peserta dilatih untuk melakukan *input*, penyimpanan, dan pembaruan data kependudukan secara elektronik; menyusun surat-menyurat menggunakan format digital; serta mengelola dokumen kepegawaian dan arsip desa melalui sistem penyimpanan berbasis *cloud*. Selain itu, pelatihan juga mencakup penggunaan perangkat lunak pengolah data dan aplikasi spreadsheet untuk mendukung penyusunan laporan administrasi dan keuangan desa secara efisien. Tim pengabdian memberikan modul dan simulasi kerja yang disesuaikan dengan kondisi administratif Desa Mekarbuana, sehingga perangkat desa dapat langsung menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.

Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan perangkat desa dalam menerapkan sistem administrasi berbasis TIK yang efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Melalui pelatihan ini, perangkat desa diharapkan mampu: memahami alur kerja

administrasi digital sesuai peraturan desa dan standar pelayanan publik; mengelola data kependudukan dan surat-menyurat menggunakan sistem elektronik dengan akurasi tinggi; membangun sistem pengarsipan digital yang mudah diakses dan aman; serta menyusun laporan administrasi dan keuangan desa secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan kompetensi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan *Good Village Governance* yang berorientasi pada efisiensi birokrasi dan akuntabilitas publik.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman dan keterampilan administrasi peserta setelah mengikuti pelatihan. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang dilakukan, terdapat peningkatan skor rata-rata dari 60% menjadi 88% dalam kemampuan administrasi digital. Sebanyak 85% peserta dinilai mampu melakukan pembuatan surat resmi desa menggunakan sistem komputerisasi dan memanfaatkan template dokumen digital yang telah disediakan. Sementara itu, 75% peserta telah menguasai penggunaan SID untuk pengarsipan dan pelacakan data penduduk secara elektronik. Selain penguasaan teknis, peserta juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya dokumentasi digital sebagai dasar transparansi dan akuntabilitas administrasi desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa, implementasi sistem administrasi digital pasca-pelatihan menghasilkan proses pelayanan yang lebih cepat, pengarsipan dokumen lebih rapi, serta pengurangan kesalahan input data hingga 40%.

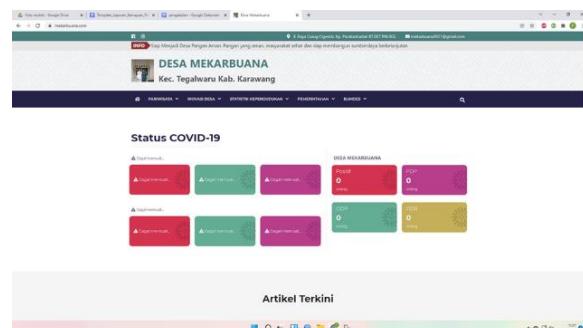
Kegiatan ini terbukti tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mengubah pola kerja perangkat desa menuju sistem administrasi yang lebih profesional dan terintegrasi. Melalui kombinasi antara pelatihan teori, praktik lapangan, dan pendampingan berkelanjutan, kegiatan peningkatan pengetahuan administrasi desa di Mekarbuana menjadi langkah penting dalam transformasi tata kelola desa menuju desa digital yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Kegiatan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan melalui pelatihan dan implementasi sistem informasi publik berbasis web di lingkungan Desa Mekarbuana. Tim pengabdian memberikan pelatihan khusus kepada perangkat desa mengenai konsep transparansi pemerintahan, prinsip akuntabilitas publik, dan tata kelola data berbasis teknologi informasi. Pelatihan mencakup praktik pembuatan dan pengelolaan website desa,

pembaruan konten informasi publik, serta pengunggahan data administrasi dan laporan kegiatan secara berkala. Selain itu, perangkat desa dilatih untuk mengelola kanal komunikasi daring, seperti fitur aspirasi warga dan formulir digital, sebagai sarana partisipasi serta pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Pendampingan dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa setiap perangkat desa memahami mekanisme pengelolaan informasi yang terbuka namun tetap sesuai dengan ketentuan perlindungan data publik.

Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya sistem pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui pemanfaatan TIK. Melalui kegiatan ini, perangkat desa diharapkan mampu: menyediakan akses informasi publik secara daring dan real time melalui *website* resmi desa; meningkatkan keterbukaan data administrasi, program pembangunan, dan laporan keuangan; menerapkan standar akuntabilitas dengan dokumentasi digital yang dapat diaudit; serta membangun mekanisme komunikasi dua arah dengan masyarakat desa melalui kanal digital. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menjadi pondasi bagi praktik *Good Village Governance* yang berkelanjutan.



Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2025)

Gambar 3. Tampilan Desa Mekarbuana

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi publik digital memberikan dampak positif terhadap keterbukaan pemerintahan desa. Gambar 3 menampilkan tampilan website resmi Desa Mekarbuana yang dikembangkan selama kegiatan pelatihan. Situs tersebut memiliki desain yang modern dan mudah digunakan dengan empat menu utama—Beranda, Profil Desa, Pelayanan Publik, dan Berita Desa—yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Berdasarkan hasil observasi dan survei kepada peserta pelatihan, 90 %

perangkat desa mampu mengelola dan memperbarui konten informasi di *website* secara mandiri, termasuk publikasi berita kegiatan, pengumuman program, dan laporan penggunaan anggaran desa. Data kunjungan situs meningkat sebesar 65 % dalam dua bulan setelah peluncuran, menunjukkan meningkatnya minat masyarakat dalam mengakses informasi desa. Selain itu, hasil wawancara dengan warga menunjukkan adanya peningkatan kepuasan terhadap keterbukaan informasi publik, dengan 78 % responden menyatakan lebih mudah memperoleh data mengenai pelayanan dan kegiatan desa dibandingkan sebelum pelatihan dilakukan.

Kegiatan ini juga berhasil memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan perangkat desa. Setiap kegiatan administrasi dan keuangan kini terdokumentasi secara digital, memungkinkan proses audit internal dilakukan dengan lebih efisien. Laporan hasil pelatihan menunjukkan bahwa penerapan sistem transparansi digital menurunkan waktu pengolahan laporan keuangan hingga 40 % dan mengurangi kesalahan input data. Dengan adanya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan informasi publik, Desa Mekarbuana menjadi contoh implementasi nyata dari pemerintahan desa yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peningkatan Partisipasi Warga

Kegiatan peningkatan partisipasi warga dilaksanakan melalui pelatihan komunikasi digital dan pendampingan penggunaan media berbasis TIK sebagai sarana interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam kegiatan ini, perangkat desa dilatih untuk mengelola kanal komunikasi daring, seperti forum diskusi desa, chat group resmi, media sosial, dan fitur aspirasi warga pada *website* desa. Selain pelatihan teknis, dilakukan juga sosialisasi tentang tata cara menampung, menindaklanjuti, dan mendokumentasikan aspirasi masyarakat secara digital agar setiap usulan dan keluhan warga dapat diterima serta direspon dengan cepat dan transparan. Tim pengabdian turut memfasilitasi simulasi forum komunikasi publik melalui media daring untuk memperkenalkan mekanisme *two-way communication* antara pemerintah desa dan masyarakat.

Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat desa melalui pemanfaatan TIK. Secara khusus, kegiatan ini ditujukan agar perangkat desa mampu: menyediakan ruang komunikasi digital yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat; mengelola forum diskusi dan

aspirasi warga secara profesional; memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi hasil rapat dan tindak lanjut usulan warga secara daring; serta menumbuhkan budaya partisipatif di mana masyarakat merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap kemajuan desa. Melalui mekanisme komunikasi yang terbuka, pemerintah desa diharapkan mampu membangun kepercayaan publik dan memperkuat hubungan sosial yang konstruktif antara perangkat desa dan masyarakat.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam pembangunan desa. Berdasarkan data *monitoring* dan wawancara dengan perangkat desa, terjadi peningkatan rata-rata 70 % dalam jumlah warga yang memberikan masukan melalui kanal digital setelah peluncuran fitur aspirasi daring di *website* desa. Selain itu, tingkat partisipasi dalam rapat desa meningkat dari 45 % menjadi 78 % setelah pelatihan komunikasi digital dilakukan. Hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa 82 % responden merasa lebih mudah menyampaikan pendapat dan keluhan kepada pemerintah desa dibandingkan sebelum adanya pelatihan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan TIK tidak hanya meningkatkan kapasitas perangkat desa, tetapi juga menciptakan perubahan sosial berupa partisipasi warga yang lebih aktif dan sadar terhadap pentingnya keterlibatan mereka dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan kegiatan ini juga berdampak pada penguatan praktik *Good Village Governance* yang berbasis partisipasi dan kolaborasi. Warga kini dapat berperan langsung dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan melalui kanal digital yang terintegrasi, sementara perangkat desa dapat mengelola masukan masyarakat sebagai dasar penyusunan program prioritas desa. Dengan demikian, peningkatan partisipasi warga melalui pemanfaatan TIK tidak hanya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga membangun ekosistem digital yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui pelatihan intensif tentang penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem pelayanan administrasi desa. Pelatihan difokuskan pada peningkatan kemampuan perangkat desa dalam menggunakan aplikasi pelayanan berbasis digital, seperti Sistem Informasi Desa (SID) dan layanan surat menyurat otomatis, serta sistem pelaporan kegiatan desa secara daring. Peserta juga diberikan

pelatihan tentang manajemen waktu pelayanan, etika komunikasi publik, dan strategi penanganan keluhan masyarakat melalui kanal digital. Dalam sesi pendampingan, tim pengabdian membantu perangkat desa mengidentifikasi permasalahan layanan yang sering terjadi, lalu merancang solusi berbasis TIK untuk mempercepat proses pelayanan, seperti digitalisasi arsip, pembuatan formulir elektronik, dan pemanfaatan *dashboard monitoring* untuk pelacakan permohonan warga secara real time.

Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya sistem pelayanan publik yang cepat, akurat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, perangkat desa diharapkan mampu: mengoperasikan aplikasi pelayanan publik berbasis TIK secara mandiri; menerapkan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam proses administrasi; menyediakan akses layanan publik yang mudah dijangkau masyarakat; serta meningkatkan kepuasan warga terhadap pelayanan pemerintahan desa. Dengan optimalisasi *Good Village Governance* berbasis TIK, diharapkan setiap layanan administrasi di Desa Mekarbuana dapat berjalan dengan standar pelayanan minimal yang terukur, efisien, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Mekarbuana. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perangkat desa, waktu penyelesaian pelayanan administrasi mengalami penurunan rata-rata dari dua hari menjadi kurang dari satu hari kerja setelah penerapan sistem digital. Data survei kepuasan masyarakat yang dilakukan pasca pelatihan menunjukkan peningkatan tingkat kepuasan dari 72 % menjadi 91 % terhadap kecepatan dan keakuratan layanan administrasi. Sebanyak 87 % peserta pelatihan menyatakan telah mampu mengoperasikan sistem pelayanan berbasis TIK tanpa pendampingan, dan 80 % warga mengakui kemudahan akses layanan melalui sistem digital yang diterapkan. Selain itu, dokumentasi pelayanan kini tersimpan secara terpusat di server desa, sehingga memudahkan proses audit dan pelaporan kepada pemerintah daerah.

Implementasi *Good Village Governance* di Desa Mekarbuana juga didukung oleh sikap terbuka dan responsif dari aparat desa. Pemerintah desa menunjukkan komitmen kuat dalam menerima ide baru dan menerapkan inovasi digital untuk peningkatan layanan publik. Keterbukaan ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara perangkat desa, warga, dan pihak eksternal, yang mempercepat proses adopsi TIK dalam tata kelola

pemerintahan. *Respons* positif dari masyarakat juga terlihat melalui peningkatan interaksi warga dengan sistem pelayanan daring serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi pelayanan publik. Hasil ini membuktikan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK mampu mewujudkan kualitas layanan yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelatihan dan pendampingan, penerapan *Good Village Governance* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Desa Mekarbuana terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik. Kegiatan pelatihan TIK berhasil meningkatkan kompetensi perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi digital, mengelola data kependudukan, serta menerapkan sistem administrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi. Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari rata-rata 58 % menjadi 87 % setelah pelatihan, menandakan efektivitas kegiatan dalam memperkuat literasi digital aparatur desa.

Dalam aspek administrasi, perangkat desa menunjukkan kemajuan substansial dalam penyusunan surat-menjurut, pengelolaan arsip, dan pelaporan digital. Penerapan sistem administrasi berbasis TIK mampu mengurangi kesalahan input data hingga 40 % serta mempercepat proses pelayanan dari dua hari menjadi kurang dari satu hari kerja. Sementara itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas terwujud melalui pengelolaan website Desa Mekarbuana yang menampilkan informasi publik secara *real time*. Data kunjungan situs meningkat sebesar 65 % dan 78 % warga menyatakan lebih mudah memperoleh informasi pelayanan dibandingkan sebelumnya.

Partisipasi warga juga meningkat secara nyata setelah pelatihan. Aktivitas warga dalam forum digital, aspirasi daring, dan rapat desa mengalami peningkatan rata-rata 70 %, menunjukkan bahwa masyarakat mulai terlibat aktif dalam pengawasan serta perencanaan pembangunan desa. Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan desa turut mengalami peningkatan signifikan, dari 72 % menjadi 91 %, setelah sistem pelayanan digital diterapkan secara penuh. Hasil ini membuktikan bahwa integrasi TIK tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi

juga memperkuat interaksi sosial dan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Penerapan *Good Village Governance* berbasis TIK di Desa Mekarbuana dapat dijadikan model praktik baik (*best practice*) dalam transformasi digital pemerintahan desa. Program ini berhasil menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keberhasilan kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya dukungan kebijakan, infrastruktur digital, serta pelatihan berkelanjutan agar desa mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Untuk keberlanjutan program, disarankan agar pemerintah desa melaksanakan pelatihan lanjutan secara periodik, memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta mengembangkan sistem monitoring berbasis indikator kinerja digital. Upaya tersebut akan memperkuat fondasi tata kelola desa yang baik, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Karawang dan Universitas Singaperbangsa Karawang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. A. A. Wiryandito, "Implementation and initial evaluation of village information system (openSID) utilization in West Sumbawa Regency," *Transform. J. Pengabdi. Masy.*, vol. 21, no. 1, pp. 150–160, June 2025, doi: 10.20414/transformasi.v21i1.13976.
- [2] N. Huda, E. Subandi, Junadi, and H. Suhindarno, "Evaluasi Program Smart Village Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro," *JIAN - J. Ilm. Adm. Negara*, vol. 9, no. 2, pp. 66–79, June 2025, doi: 10.56071/jian.v9i2.1252.
- [3] N. K. D. A. Jayanti and G. Sastrawangsa, "UTILIZE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR VILLAGE OFFICIALS IN PROVIDING PUBLIC SERVICES UTILIZE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR VILLAGE OFFICIALS IN PROVIDING PUBLIC SERVICES," *J. Sinergitas PKM CSR*, vol. 4, no. 3, p. 226, Dec. 2020, doi: 10.19166/jspc.v4i3.2865.
- [4] R. P. Dhaniawaty, "Sistem Informasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Web Pada Desa Cilayung Kabupaten Kuningan," *J. Teknol. Dan Inf.*, vol. 10, no. 1, pp. 52–61, Mar. 2020, doi: 10.34010/jati.v10i1.2852.
- [5] W. T. Rompas, S. R. Sentinuwo, and Y. D. . Y. Rindengan, "Rancang Bangun Desa Cerdas di Desa Sea Tumpengan: Design and Build a Smart Village In Sea Tumpengan Village," *J. Tek. Inform.*, vol. 18, no. 2, pp. 77–86, June 2023, doi: 10.35793/jti.v18i2.50550.
- [6] A. Kurniawan, A. Octa Indarso, W. Yoga Sembada, and K. Anwar, "Pemberdayaan Literasi Digital di Desa Waringin Kurung, Cimanggu Pandeglang," *Indones. J. Soc. Engagem.*, vol. 2, no. 2, pp. 91–105, Aug. 2021, doi: 10.33753/ijse.v2i2.35.
- [7] W. Ramdhani, S. Santoso, N. Nofriadi, and J. Kartika, "Pemberdayaan Perangkat Desa Silo Baru Melalui Pelatihan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Efektivitas Administrasi Desa," *Jurdimas J. Pengabdi. Kpd. Masy. R.*, vol. 8, no. 3, pp. 463–468, July 2025, doi: 10.33330/jurdimas.v8i3.3916.
- [8] R. Fitri, A. N. Asyikin, and A. S. B. Nugroho, "Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik," *POSITIFJ. Sist. Dan Teknol. Inf.*, vol. 3, no. 2, p. 99, Dec. 2017, doi: 10.31961/positif.v3i2.429.
- [9] N. Nurchim and I. Nofikasari, "Analisis Model Pengembangan Telecenter Guna Mewujudkan Desa Pintar di Indonesia," *Fountain Inform. J.*, vol. 3, no. 2, p. 36, Nov. 2018, doi: 10.21111/fij.v3i2.2466.
- [10] R. A. Yuliana and N. Natalia, "TRANSFORMASI DIGITAL DESA PONGGOK: TANTANGAN DAN POTENSI MENUJU DESA PINTAR YANG BERKELANJUTAN," *Acad. J. Inov. Ris. Akad.*, vol. 5, no. 2, pp. 90–97, May 2025, doi: 10.51878/academia.v5i2.4977.
- [11] K. Akib, Nur Afriyani Putri, and Eka Wahyuningsih, "SOSIALISASI INOVASI DESA DIGITAL DALAM MENUNJANG PELAYANAN PUBLIK DI DESA BETALEMBA KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN KABUPATEN POSO," *Panrita Abdi - J. Pengabdi. Pada Masy.*, vol. 9, no. 2, pp. 457–465, Apr. 2025, doi: 10.20956/pa.v9i2.34054.
- [12] H. Sahputra, R. Yesputra, A. P. Lubis, and F. Furqon, "PENTINGNYA DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK DESA," *J. Pemberdaya. Sos. Dan Teknol. Masy.*, vol. 4, no. 1, p. 122, Apr. 2024, doi: 10.54314/jpstm.v4i1.2115.
- [13] A. Aristoni, "Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan," *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, vol. 11, no. 1, p.

- 67, June 2020, doi: 10.21043/yudisia.v11i1.7538.
- [14] Titis Ayu Angganten, "Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan," *J. Sos. Hum.*, vol. 1, no. 2, pp. 220-229, Dec. 2024, doi: 10.70214/vyb31023.
- [15] Y. Mohamad, Z. Bonok, and S. Abdussamad, "Digital Transformation: Tabumela Village Government Administration Management Through a Web-Based System," *J. Pengabdi. Pada Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 52-62, May 2024, doi: 10.37905/ejppm.v2i2.25.
- [16] Y. Nurhadryani, F. Nuryantika, I. Hermadi, and H. F. Ahmad, "Pengembangan Modul Front-End KMS Desa Digital untuk meningkatkan adopsi Inovasi Digital pada Desa di Indonesia," *J. Ilmu Komput. Dan Agri-Inform.*, vol. 12, no. 1, pp. 72-78, May 2025, doi: 10.29244/jika.12.1.72-78.
- [17] Febrianty and I. G. E. P. S. Sentanu, "Assessing the Effectiveness of the Village Internet Program and Village Websites in Promoting Good Local Governance (GLG) and Electronic-Based Government Systems (SPBE) Through Administration and Governance Support," in *Proceedings of the Fifth Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2022)*, vol. 764, A. F. Wijaya, F. Amin, and M. Iqbal, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 764., Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 266-281. doi: 10.2991/978-2-38476-090-9_23.
- [18] C. S. Bailard, "Information and Communication Technology, Transparency, and Accountability," in *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, Oxford University Press, 2016. doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.37.
- [19] K. Bandyopadhyay, A. Kumar Hazra, and Professor, Department of Lifelong Learning and Extension (REC), Visva-Bharati, Sriniketan, West Bengal, India., "IMPACT OF ICT IN STRENGTHENING TRANSPARENCY IN RURAL LOCAL GOVERNANCE: A CASE STUDY IN FOUR GRAM PANCHAYATS IN WEST BENGAL, INDIA," *Int. J. Adv. Res.*, vol. 10, no. 11, pp. 1122-1130, Nov. 2022, doi: 10.21474/IJAR01/15774.
- [20] Kalidoss and A. D. Ghate, "LOCAL GOVERNANCE AND TRANSPARENCY THROUGH E-GOVERNMENT INITIATIVES AND ENHANCING ACCOUNTABILITY AT THE LOCAL LEVEL," *Lex Localis - J. Local Self-Gov.*, vol. 23, no. S1.
- [21] M. F. Pramono, A. Musthafa, D. A. Arifah, and A. Alfajri, "TRANSFORMASI KAMPUNG PANCASILA: PENDAMPINGAN DIGITALISASI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA NONGKODONO," *J. Terap. Abdimas*, vol. 10, no. 1, pp. 88-96, Jan. 2025, doi: 10.25273/jta.v10i1.21402.
- [22] A. Oktarina *et al.*, "Smart Governance in Indonesian Village Towards SDGs Achievement," *Polit. Indones. Indon. Polit. Sci. Rev.*, vol. 8, no. 1, pp. 107-122, Apr. 2023, doi: 10.15294/ipsr.v8i1.39168.
- [23] A. Hussain, "ICT-driven Transparency: Empirical Evidence from Selected Asian Countries," *J. Telecommun. Digit. Econ.*, vol. 11, no. 3, pp. 19-41, Sept. 2023, doi: 10.18080/jtde.v11n3.658.
- [24] M. R. Roidatua and A. Purbantara, "Collaborative Governance in Developing Smart Village," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Rural Socio-Economic Transformation: Agrarian, Ecology, Communication and Community Development Perspectives, RUSET 2021, 14-15 September 2021, Bogor, West Java, Indonesia*, Bogor, Indonesia: EAI, 2022. doi: 10.4108/eai.14-9-2021.2317180.
- [25] S. Renukappa, S. Suresh, W. Abdalla, N. Shetty, N. Yabbati, and R. Hiremath, "Evaluation of smart village strategies and challenges," *Smart Sustain. Built Environ.*, vol. 13, no. 6, pp. 1386-1407, Nov. 2024, doi: 10.1108/SASBE-03-2022-0060.
- [26] P. Hlaváček, M. Kopáček, L. Kopáčková, and V. Hruška, "Barriers for and standpoints of key actors in the implementation of smart village projects as a tool for the development of rural areas," *J. Rural Stud.*, vol. 103, p. 103098, Oct. 2023, doi: 10.1016/j.jrurstud.2023.103098.
- [27] A. P. E. Susilowati, R. Rachmawati, and R. Rijanta, "Smart village concept in Indonesia: ICT as determining factor," *Heliyon*, vol. 11, no. 1, p. e41657, Jan. 2025, doi: 10.1016/j.heliyon.2025.e41657.
- [28] X. Zhang and Z. Zhang, "How Do Smart Villages Become a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas? Smart Village Planning and Practices in China," *Sustainability*, vol. 12, no. 24, p. 10510, Dec. 2020, doi: 10.3390/su122410510.
- [29] M. Adamowicz and M. Zwolińska-Ligaj, "The 'Smart Village' as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of

- Poland," *Sustainability*, vol. 12, no. 16, p. 6503, Aug. 2020, doi: 10.3390/su12166503.
- [30] C. García Fernández and D. Peek, "Connecting the Smart Village: A Switch towards Smart and Sustainable Rural-Urban Linkages in Spain," *Land*, vol. 12, no. 4, p. 822, Apr. 2023, doi: 10.3390/land12040822.
- [31] H. K. Doloi, "Digital Inclusion for Rural Growth: Internet Usage and Smart Villages Development," *Asia-Pac. J. Rural Dev.*, vol. 35, no. 1, pp. 40–57, June 2025, doi: 10.1177/10185291251343357.
- [32] M. M. Ridzki, "Smart Village Initiatives: Bridging the Urban-Rural Divide Through Digital Inclusion," *J. Village Dev. Innov.*, vol. 1, no. 1, pp. 29–38, Dec. 2024, doi: 10.59261/jvdi.v1i1.3.
- [33] C. H. A. Dirgatama, S. Permansasah, and D. Rusmana, "Understanding smart village concepts: digital literacy and mobile technology," *J. Educ. Learn. EduLearn*, vol. 18, no. 3, pp. 1007–1020, Aug. 2024, doi: 10.11591/edulearn.v18i3.21293.
- [34] M. Iqbal, E. Erfina, H. Lawelai, S. Lubis, and M. A. A. Darlis, "Digital Transformation in Rural Areas: Directions for Digital Village Development in Developing Countries," *JPSI J. Public Sect. Innov.*, vol. 9, no. 2, pp. 58–72, May 2025, doi: 10.26740/jpsi.v9n2.p58-72.
- [35] S. H. Idrus, L. M. G. Jaya, A. S. Jabar, I. Nurfikria, and W. O. Lusianai, "The Role of Public Policy in Improving Digital Literacy in Rural Communities," *J. Acad. Sci.*, vol. 2, no. 6, pp. 1697–1706, June 2025, doi: 10.59613/fgbrsm63.
- [36] M. R. Mutamimma, A. S. Kustono, and R. Effendi, "Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi," *E-J. Ekon. Bisnis Dan Akunt.*, vol. 5, no. 1, p. 105, May 2018, doi: 10.19184/ejeba.v5i1.7746.
- [37] R. Muzayanah *et al.*, "Pelayanan Administrasi Digital untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi di Desa Kalisidi," *J-ABDIPAMAS J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 7, no. 1, p. 39, Apr. 2023, doi: 10.30734/j-abdipamas.v7i1.2826.
- [38] I. Firdaus, S. Sembiring, A. Riyanto, R. Situmeang, and P. K. Karo, "Pendampingan Pengelolaan Website Desa Hajimena sebagai Penunjang Program Digitalisasi Desa," *J. Kreat. Pengabdi. Kpd. Masy. PKM*, vol. 5, no. 10, pp. 3387–3396, Oct. 2022, doi: 10.33024/jkpm.v5i10.7638.
- [39] Umar, C. Raheni, and R. Iskandar, "Digitalization of Village-Owned Enterprises in Supporting SDGs in Rural Areas: Opportunities and Challenges in Sigi Regency," *IECON Int. Econ. Bus. Conf.*, vol. 3, no. 2, pp. 1924–1938, Sept. 2025.
- [40] E. A. Manapa Sampetoding and M. Er, "Digital Transformation of Smart Village: A Systematic Literature Review," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 239, pp. 1336–1343, 2024, doi: 10.1016/j.procs.2024.06.304.
- [41] A. P. E. Susilowati, R. Rachmawati, and R. Rijanta, "Smart village concept in Indonesia: ICT as determining factor," *Helijon*, vol. 11, no. 1, Jan. 2025, doi: 10.1016/j.helijon.2025.e41657.